# PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)

Pembimbing:
**Prof.Dr.Hj Umi Narimawati Dra.,SE.,Msi**
**Inta Budi Setia Nusa SE.,M.Ak**

Oleh :
**Katty Aryanti Martina**
**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

***ABSTRACT***

*This research was conducted at the Regional Government of West Bandung region. The awareness happened in the Government related to the reporting of financial in the management of West Bandung District Government is still low. The control is not in accordance with the Government Accounting Standards and the several programs is not worked correctly. This is due to the fact that the lack of internal control systems is not in proper way. Therefore, it makes the Government get an unqualified opinion (Wajar Tanpa Pengecualian). The aim of this study is to recognise the number of influence of the accounting information system and internal control system of financial reporting to the value of financial controling information in the West Bandung District Government.*

*The method used in this research is descriptive and verification method with a qualitative approach. The unit of analysis in this study is Sub Division of Finance in West Bandung District Government from 20 respondents. Testing statistic used is the calculation of correlation, the multiple regression analysis, and the coefficient of determination. To investigate the hypothesis used is 't' test by using Exxel Microsotf Office 2010 and SPSS 20.0 for windows tools.*

*The results showed that the accounting information system and internal control system have a significant effect on the value of the local government financial reporting information . The coefficient of determination demonstrates that the Accounting Information Systems and Internal Control System have a huge number of influence to the value of Local Government Financial Reporting Information 64% .*

*Key words: Accounting System Information, Internal Control System, value of the local government financial reporting information*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Safrida et al, 2010). Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaaan keuangan negara adalah dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Purwaniati dan Imam, 2008).

Terkait dengan masalah akuntabilitas di Indonesia menurut Wahyudi Kumorotomo (2010) dalam Mei Anjarwati (2012). ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kinerja akuntabilitas pemerintahan daerah. Berkaitan dengan administrative accountability dan profesional accountability isu pokok yang muncul adalah buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah. Kenyataan itu bisa di ketahui dari semakin sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebagai salah satu kosekuensinya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu persyaratan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka amanat rakyat. Maka dengan itu Pemerintah Daerah harus paham dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang undang No 17 tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Purwaniati dan Imam, 2008). Penerapan sistem akuntansi ini berfungsi sebagai mekanisme, prosedur kerja dan alat kontrol dalam penngelolaan keuangan. Agar semua pelaksana keuangan daerah mempu mengelola keuangan mengenai sistem akuntansi, oleh sebab itu pemahaman pengelolaan keuangan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini akan menunjang daerah dalam menyajikan laporan keuangan.

Sehingga dengan pengelolaan keuangan yang benar maka akan terwujud good governace.(Sri Dewi Wahyundaru, 2001) dalam (Lyna dan Arifin, 2007) Distribusi kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, di perlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desantralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi.

Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi adalah sama dengan tujuan penyusunan sistem akuntansi antara lain : 1) Untuk menyediakan informasi bagi pengambilan kebijakan. 2) Untuk memperbaiki infomasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi. 3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. 4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Memurut (Ifa dan Mochammad Ridwan, 2012) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai daam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik. Laporan keuangan pemerintah yng berkualitas harus dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami (SPAP KK, 2005) dalam (Ifa dan Mochammad Ridwan, 2012). Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kiteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektitivitas sistem pengendalian intern (Ifa dan Mochammad Ridwan, 2012).

Bedasakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian inten meliputi bebagai kebijakan yaitu, (1) tekait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standa akuntansi pemerintahan, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah.

Salah satu komponen pengendalian intern sendiri yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian bekala atau berkelanjutan dari mutu penempilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasikan sesuai dengan peubahan dalam kondisi-kondisi (Arens, 2003:412)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2013 di Auditorium BPK, Rabu (28/5), Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jawa Barat, Ir. Cornell S. Prawiradiningrat, M.M., menyampaikan LHP kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah. Terdapat 5 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Barat yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pebgecualian (WTP) dalam hal penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yaitu Kabupaten Banjar, Kota Depok, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka dan Kota Cimahi. 11 Pemda memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian yaitu Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Subang. Sedangkan untuk Kabupaten Indramayu mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat atau Disclimer Opinion. Permasalahan Aset Tetap yang belum tertib, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan yang masih banyak kelemahan, kelebihan pembayaran melebihi prestasi pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran gaji pada PNS yang telah pensiun, bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai, dan terdapat penggunaan langsung atas retribusi daerah, masih jadi pengecualian bagi banyak Pemda (bandung.bpk.go.id, 2/6/2014).

Juga diperkuat dengan pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (inilahkoran.com, 23/2/2015) yang menilai kinerja eksekutif hingga saat ini belum optimal. Karena keraguannya itulah, predikat WTP yang diidamkan Kabupaten Bandung Barat selama ini bakal sulit tercapai. Masalah yang terdapat pada Kabupaten Bandung Barat yaitu :

1. Kinerja eksekutif yang masih lemah
2. Terdapat beberapa program kerja yang tidak terlaksana
3. Lemahnya pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Dari fenomena tersebut bisa dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta masih memiliki kekurangan dalam sistem pengendalian intern, sehingga belum bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka saya tertarik

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Wing Wahyu (2006:19) yang dimaksud dengan Sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan perangkat sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah data, dan menyajikan informasi akuntansi kepada pihak internal (manajemen perusahaan) dan pihak eksternal (pembeli, pemasok, pemerintah, kreditur, dan sebagainya).

Menurut Krismiaji (2010: 4) yang dimaksud dengan Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis". Dalam suatu perusahaan, penerapan sistem informasi akuntansi memiliki hubungan dengan sistem-sistem yang lebih besar maupun lebih kecil.

Menurut Agustinus Mujilan (2012:3) yang dimaksud dengan Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. SIA mewujudkan perubahan ini secara manual atau terkomputerisasi.

Menurut Boodnar dan Hopwood ( 2006:8) yang dimaksud dengan Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentraformasi data akuntansi menjadi informasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah seperangkat sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, mencatat serta mengolah transaksi-transaksi data sehingga menghasilkan informasi untuk disajikan bagi pihak internal maupun pihak eksternal.

#### 2.1.2 Sistem Pengendalian Intern

Dalam peranturan pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemda, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

#### 2.1.3 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship)
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability andRetrospective Reporting)
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and Authorization Information)
4. Kelangsungan Organisasi (Viability)
5. Hubungan Masyarakat (Public Relation)
6. Sumber Fakta dan Gambaran (Source of Facts and Figures
7. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait".

Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai : (a) akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; (b) manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam perode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

#### 2.1.3.1 Nilai Informasi

Menurut Suwardjono (2005:111) pengertian nilai informasi adalah sebagai berikut:

"Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan".

Menurut Suwardjono (2005:165),

"Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 laporan keuangan pemerintah memiliki karakteristik kualitatif antara lain:

1. Relevan

Yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

a Manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a Penyajian jujur. Informasi meng-gambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat di-harapkan untuk disajikan.

b Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 tahun 2005, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Kebutuhan informasi tentang kegiatan, operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hakdan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan suatu sistem akuntansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut (BPKP, 2014:9).

Sistem akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 11 adalah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Untuk mendapatkan nilai informasi yang baik tidak hanya sistem akuntansi saja yang di butuhkan akan tetapi sistem pengendalian internal dalam pemerintahan itu sendiri harus bejalan dengan baik. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

**2.3 Hipotesis**

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137), hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

> "Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris".
>
> Sedangkan Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul (2012 :76), mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:
>
> "Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian".

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

**3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sasaran permasalah dalam penelitian karya ilmiah. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi pada objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2014:13),

"Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)".

Objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 3.2 Metode Penelitian

Menurut I Made Wirartha (2006:68), "Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah".

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif.

Menurut Mohamad Nazir (2005:54) metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

"Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang".

Metode penelitian deskiptif digunakan untuk mendeskriptifkan fenomen-fenomena yang akan diteliti pada penelitian. Serta mengumpulkan dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah serta tujuan penelitian sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Menurut Juliansyah Noor (2012:20) metode verifikatif adalah sebagai berikut:

"Verifikatif penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya kerugian terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu".

Dalam penelitian ini metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 3.3 Operasional Variabel

Operasional Variabel merupakan definisi yang dinyatakan dengan menetukan pemikiran atau gagasan berupa kriteria-kriteria yang dapat diuji secara khusus bagi suatu penelitian menjadi variabel-variabel yang dapat diukur.

Menurut Sugiyono (2013:38), "Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Sesuai dengan judul penelitian "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat". Maka variabel yang diteliti dibedakan menjadi dua bagian yaitu senagai berikut:

1. Variabel Bebas/ *independent* (X)
   menurut Umi Narimawati (2010:27) variabel bebas adalah:
   "Variabel yang pengaruhnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh penulis untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang di observasi dalam kaitannya dengan variabel lain".
   Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi ($X_1$) dan Sistem Pengendalian Intern ($X_2$).
2. Variabel tidak Bebas/*dependent* (Y)
   Menurut Sugiyono (2014:61),
   "Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".
   Penulis menggunakan skala pengukuran ordinal dalam kuisioner sebagai alat ukur penelitian untuk mendapatkan kebenaran mengenai masalah dalam penelitian inI.

### 3.4 Populasi Dan Sampel

**1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2013:80),

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Dalam Penelitian ini penulis mengambil populasi Sub Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

**2. Sampel**

Sampel menurut Sugiyono (2013:81),

"Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)".

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu para pegawai Sub Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Bandung dengan jumlah 20 Pegawai.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265),

"Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya".
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif.

1. Penelitian Lapangang (*Field Research*)
   a. Kuisioner (angket)
      Menurut Sugiyono (2012:137),

      "Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya".
   b. Interview (Wawancara)
   Menurut Sugiyono (2012:137),

   "Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti telepon).".

2. Study Kepustakaa (*Library Research*)

Study kepustakaan adalah pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan literatur-literatur untuk menunjang teori yang berhubungan dengan fenomena yang akan di teliti dan mencari metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis juga menggunakan media internet dalam pencarian data dan sumber yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**3.6 Metode Pengujian Data**

Rancangan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif.

1. Metode Deskriptif
   Dalam metode deskripitif digunakan untuk meneliti fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalah penelitian dengan cara yang sistematis selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisi untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Metode Verifikatif
   Sedangkan dengan pendekatan metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesi. Pendekatan metode verifikatif pengujian data mengunakan stastistik, untuk mengetahui apakan variabel Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif

1. Data Kualitatif
   Menurut Sugiyono (2010:14),
   "Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut
   berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail."

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
b. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
c. Dihitung skor setip vatiabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
d. Unruk mendeskipsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel atupun grafik.
e. Untuk jawaban deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, Metode Kuantitatif

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data variabel bebas ($X_1$) Sistem Informasi Akuntansi dan ($X_2$) Sistem Pengendalian Intern dikumpulkan melalui kuisioner yang masuh berskala ordinal. Maka sebelum diolah dan dipasangkan pada variabel terikat (Y) Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, data tersebut harus diubah menjadi data interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI).

Dalam metode Regresi Linear Berganda untuk mendapatkan hasil yang akurat maka diperlukan pengujian asumsi klasik.

1. Analisis Regesi Berganda
   a. Asumsi normalitas data

Menurut Suliyanto (2011) dalam Di (Asih I Maruddani, 2014:114) metode yang digunakan untuk melihat kenormalan suatu distribusi ada 2 yaitu :

1) Uji Normalitas dengan Analisis Grafik Analisis grafik dengan histogram dilakukan dengan cara menggambarkan variabel dependent sebagai sumbu vertikal dan nilai residual terstandarisasi sebagai sumbu horizontal. Jika Histogram Standardized Regression Residual membentuk kurva seperti lonceng maka nilai residual tersebut dinyatakan normal. Analisis grafik dengan *Normal Probability Plot* dilakukan dengan cara membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan ploting. Jika data berdistribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti ke garis diagonalnya.
2) Uji Normalitas dengan *Jarque-Bera* (JB Test) JB Test merupakan uji normalitas dengan berdasarkan pada koefisien keruncingan (*kurtosis*) dan koefisien kemiringan (*skewness*).

b. Asumsi *Multikolinieritas*

Multikolinieritas yakni situasi dimana terdapat korelasi atau hubungan linier antar variabel bebas sehingga variabel-variabel bebas tersebut tidak bersifat ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal memiliki nilai korelasi nol diantara sesamanya. Adanya multikolinieritas menyebabkan nilai dari koefisien-koefisien regresi tidak dapat ditaksir, sehingga dapat menyesatkan interpretasi dan nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga sehingga tingkat signifikansi variabel bebasnya buruk.

c. Asumsi Heteroskedastisitas

Dalam analisis regesi linier berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dan model tersebut bersifat *BLUE* var (ui) = σ2 (konstan), yaitu semua sesatan mempunyai variasi yang sama. Apabila var (ui) ≠ σ2, maka varians bersifat *heteroskedastisitas*. Apabila terjadi *heteroskedastisitas* penaksir OLS tetap linier tidak bias, tetapi tidak lagi mempunyai variansi minimum yang terbaik sehingga penaksir-penaksir OLS menjadi tidak efisien.

Untuk menguji ada tidaknya *heteroskedastisitas* digunakan uji-*rank Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat *heteroskedastisitas* (Gujarati, 2003: 406).

*d. Uji Autokeralasi*

Untuk menguji ada tidaknya *autokorelasi*, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik *Durbin-Watson* (D-W):

Pada analisi koelasi person bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Analsis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Pengujian Alat Ukur Analisis

Pengujian instrumen ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan reabilitas suatu alat pengukur data agar penulis memperoleh kesimpulan yang benar dan akurat. Pengujian ini dilakukan terhadap 20 orang responden dengan jumlah item pernyataan yang diuji coba sebanyak 30 item, yaitu 12 item untuk variabel X1, 10 item untuk vaiabel X2 dan 8 item untuk variabel Y. Hasil uji coba instrumen dihitung dengan menggunakan prorgram *Microsoft Office Excel 2010.*

**1. Pengujian Validitas**

Uji validitas instumen ini dihitung menggunakan rumus korelasi *Product Moment* dari Pearson dengan bantuan *Microsoft Office Excel 2010.* Setelah dilakukan perhitungan dan diperoleh $r_{hitung}$ untuk setiap item, kemudian membadingkan $r_{hitung}$ disesuaikan dengan standar yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya yakni 0,3. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid, tetapi jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Rekapitulasi hasil perhitungan validitas instrumen untuk variabel X1 dan variabel X2 yang terdiri dari 22 item pernyataan tampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**
**Rekapitulasi Validitas Instrumen Variabel X**

| No. Item Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|
| X1 | | | |
| 1 | 0.34 | 0.3 | Valid |
| 2 | 0.37 | 0.3 | Valid |
| 3 | 0.51 | 0.3 | Valid |
| 4 | 0.56 | 0.3 | Valid |
| 5 | 0.37 | 0.3 | Valid |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.35 | 0.3 | Valid |
| 7 | 0.41 | 0.3 | Valid |
| 8 | 0.62 | 0.3 | Valid |
| 9 | 0.43 | 0.3 | Valid |
| 10 | 0.73 | 0.3 | Valid |
| 11 | 0.52 | 0.3 | Valid |
| 12 | 0.69 | 0.3 | Valid |
| X2 | | | |
| 13 | 0.39 | 0.3 | Valid |
| 14 | 0.68 | 0.3 | Valid |
| 15 | 0.63 | 0.3 | Valid |
| 16 | 0.76 | 0.3 | Valid |
| 17 | 0.34 | 0.3 | Valid |
| 18 | 0.35 | 0.3 | Valid |
| 19 | 0.68 | 0.3 | Valid |
| 20 | 0.45 | 0.3 | Valid |
| 21 | 0.8 | 0.3 | Valid |
| 22 | 0.76 | 0.3 | Valid |

Sumber: Data yang telah diolah, 2015

Berdasarkan tabel rekapitulasi variabel instrumen variabel X1 dan variabel X2, maka dapat disimpulkan bahwa dari 22 item pernyataan seluruh item pernyataan yang dinyatakan valid dengan tingkat kepercayaan 95%.

Untuk variabel Y yang terdiri dari 8 item pernyataan, rekapitulasi hasil perhitungan validitas instrumennya tampak pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**
**Rekapitulasi Validitas Instrumen Variabel Y**

| No. Item Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 23 | 0.35 | 0.3 | Valid |
| 24 | 0.34 | 0.3 | Valid |
| 25 | 0.38 | 0.3 | Valid |
| 26 | 0.5 | 0.3 | Valid |
| 27 | 0.31 | 0.3 | Valid |
| 28 | 0.41 | 0.3 | Valid |
| 29 | 0.46 | 0.3 | Valid |
| 30 | 0.41 | 0.3 | Valid |

Sumber: Data yang telah diolah, 2015

Berdasarkan tabel rekapitulasi variabel instrumen variabel Y, maka dapat disimpulkan bahwa dari 8 item pernyataan variabel Y terdapat seluruh pernyataan dinyatakan valid dengan tingkat kepercayaan 95%.

Berdasarkan tabel di atas, maka dalam penelitian ini jumlah item pernyataan angket yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebanyak 30 item, yaitu 12 item untuk variabel Sistem Informasi Akuntansi (X1), 10 item untuk variabel Sistem Pengendalian Intern dan 8 item untuk variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

**2. Pengujian Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus Koefisien Alfa dari Cronbach,

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil uji reliabilitas di atas, diketahui bahwa instrument penelitian diperoleh $r_{hitung}$ sebesar 0,7146 dengan nilai $r_{tabel}$ = 0, 7. Ini berarti nilai $r_{hitung}$ lebih besar dari $r_{tabel}$ (0,7146 > 0,7), maka dengan demikian instrumen (angket) penelitian yang digunakan sudah reliabel.

### 4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif

Dalam analisis digunakan untuk memberikan gambaran objek yang diteliti, data hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel distribusi frekuensi dan skor masing-masing indikator variabel yang diteliti. Gambaran data tanggapan responden akan memberikan informasi bagaimana kondisi setiap indikator variabel

yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden berdasarkan persentase skor jawaban responden dan diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum dan skor minimum.

**4.1.3.1 Analisis Deskptif Sistem Informasi Akuntansi (X1)**

Variabel Sistem Informasi Akuntansi menggambarakan seperangakat sistem uyang berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, mencatat serta mengolah tansaksi-transaksi data keuangan sehingga menghasilkan suatu informasi untuk disajikan bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk menilai masing-masing indikator peneliti menggunakan nilai presentasi skor ideal dengan skor total. Berdasarkan data deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahwa system informasiakuntansi adalah baikdenganhasil 80 %, adapun dimensi yang paling tinggi dalam system informasi akuntansi yaitu Prosedur, sedangkan yang terendah yaitu sumber daya manusia. Maka dapat disimpulkan pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sudah menjalankan prosedur Sistem Informasi Akuntansi dengan baik namun masih minimnya sumberdaya yang memahami Sistem Informasi Akuntasi. Sehingga harus lebih banyak melakukan pelatihan mengenai Sistem Informasi Akuntansi agar dapat menjalankan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan baik dan benar.

**4.1.3.2 Analisis Deskptif Sistem Pengendalian Intern (X2)**

Sistem pengendalian intern adalah suatu seperangkat sitem atau prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai keefisienan untuk menghasilkan nilai pelaporan keuangan yang andal. Berdasarkan data deskriptif tersebut dapat disimpilkan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah baik dengan hasil 85,80%, adapun dimensi yang paling tinggi dalam Sistem Pengendalian Intern yaitu Pemantauan pengendalian intern, sedangkan yang terendah yaitu informasi dan komunikasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan pengendalian sudah berjalan dengan baik namun masih kurangnya informasi dan komunikasi. Dimana dalam penyajian informasi masih belum tepat waktu dan masih terdapat kerancuan.

**4.1.3.3 Analisis Deskptif Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Berdasarkan data deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahawa Nilai Informasi pelaporan keuangan adalah baik dengan hasil 93,31%, adapun dimensi yang paling tinggai dalam Nilai Informasi Pelaporan Keuangan yaitu relevan, sedangkan yang terendah yaitu dapat dibandingkan. Maka dapat disimpulkan bahwa informasi yangtermuat didalamnya sudah dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Namun laporan keuangan masih lemah untuk dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya.

**4.1.4 Hasil Analisis Verifikatif**

**1. Uji Asumsi Normalitas Data**

Uji asumsi Normalitas ini digunakan untuk melihat apakah nilai residual memiliki normalitas ataukah tidak. Uji normalitas dapat diuji dengan uji histogram, uji normal P Plot, Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Pengujian yang akan dilakukan adalah dengan pengujian JB atau grafik. Pengujian ini sayangnya memiliki berbagai kelemahan dan menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda.

Pada grafik histogram memprlihatkan bahwa pola distribusi yang muncul melenceng ke atas kanan, artinya data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Sedangkan bila kita melihat pada gambar P-Plot, terlihat bahwa data menyebar, mengikuti dan mendekati disekitar garis diagonalnya yang menandakan uji normalitas yang dilakukan telah terpenuhi atau model regrasi memenuhi asumsi normalitas.

**2. Uji Asumsi Multikolinieritas**

Pada Uji Asumsi Multikolinieritas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi atau keterkaitan yang tinggi antar variabel bebas yang digunakan pada sebuah penelitian dalam satu regresi linear berganda. Jika skor menunjukkan nilai korelasi yang tinggi anatara variabel-variabel bebas tersebut, maka hubungan antara variabel bebas dan terikatnya akan terganggu. Analisis yang digunakan dalam penghitungan ini adalah varience inflation factoe (VIF), korelasi pearson atau melihat eigenvalues dan condition index (CI).Pada tabel jelas sangat terlihat bahwa nilai tolerance adalah 0,873 dan nilai VIF adalah 1,146. Disesuaikan dengan standar pengambilan keputusan yang telah ditentukan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (0,873 > 0,10) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (1,146 ≤ 10) maka tidak terjadi multikolinearitas.

**3. Uji Asumsi Heteroskedastisitas**

Digunakan untuk melihat ketidak samaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Dalam analisis regresi, jika terdapat kesamaan anatara varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya adalah tetap maka persyaratan terpenuhi, dengan kata lain homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Ketentuan:

a. Jika terjadi suatu pole tertentu secara teratur pada titik-titik yang muncul (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.
b. Jika muncul pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu garis Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.Pada gambar Scatterplot menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas yang dikarenakan tidak munculnya pola-pola tertentu pada titik-titik yang menyebar di bawah angka 0 pada sumbu garis Y.

**4. Uji Asumsi Autokorelasi**

Digunakan untuk melihat korelasi yang terjadi anatara sebuah periode t dengan periode sebelumnya (t-1), uji ini dilakukan karena tidak boleh terdapat korelasi atau hubungan antara observasi dengan observasi data sebelumnya. Uji ini biasanya dilakukan pada time series (runtut waktu) dengan menggunakan uji Durbin – Watson, uji Run Test ataupun uji Lagrange Multiplier (jika data di atas 100).

**2. Uji Regresi Linier Berganda**

Dalam melakukan uji hipotesis penelitian peeliti menggunakan analisis regesi berganda. Analisis ini merupakan analisis regresi, dan terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain:

a. Menaikkan skala penelitian yang digunakan dengan menggunakan *metode successive interval* (MSI), bila skala penelitian yang digunakan adalah skala ordinal.
b. Melakukan analisis hubungan antar variabel yang diteliti apakah memiliki tingkat korelasi yang signifikan ataukah tidak, dan dilanjutkan dengan pengujian regresi.

**1) Uji Asumsi kolerasi**

Dilakukan penghitungan uji bivariate untuk menghitung tingkat korelasi antar variabel penelitian dengan menggunakan analisis Pearson,

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment*, diperoleh hasil bahwa nilai Sig.(*2-tailed*) semuanya memiliki nilai yang lebih kecil dari ketentuan nilai α (0,05). Artinya, semua variabel penelitian yang digunakan memiliki korelasi yang signifikan, dengan tingkat keeratan korelasi yang sedang (*moderate correlation*). Dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**2) Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan, tabel *model summary* menunjukkan nilai *R square* ($R^2$) atau koefisien determinasi adalah 0,640 atau sebesar 64%. Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel sistem informasi akuntansi dan sitem pengendalian intern terhadap variabel nilai infromasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 64%. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pengaruh lain yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di luar variabel yang diteliti yaitu sebesar 46% (100% - 64% = 46%).

**3) Uji Hipotesis**

Untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah maka diperlukan pengujian statistik secara pearson dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Ho : β ≤ 0, Sistem Informasi Akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ha : β ≥ 0, Sistem Pengendalian Intern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji t sebesar 2,228 yang diperoleh dari ttabel pada α = 0,05 dengan derajat kebebasan (Degree of Freedom) = 10, untuk pengujian dua pihak. Dari hasil tabel menunjukkan nilai Sig (0.000) < dari α (0.05), maka Ho ditolak dan H1 diterima, maka model rantai kausal tersebut linear. Artinya, sistem informasi akuntasi dan sistem pengendalian intern secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan besaran koefisin determinan 64%.

Besarnya pengaruh masing-masing variabel kausal yakni Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Akuntansi terungkap bahwa besarnya pengaruh masing-masing variabel kausal sebesar 0,559 untuk variabel Sistem Informasi Akuntansi (x1) dan 0,407 untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (x2) dengan pengaruh yang signifikan karena nilai kolom Sig. lebih kecil dari α (0.05).

**4.1.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil dari uji asumsi kolerasi diperoleh hasil bahwa nilai Sig.(*2-tailed*) semuanya memiliki nilai yang lebih kecil dari ketentuan nilai α (0,05), berdasarkan uji koefisien determinasi diperoreleh hasil penghitungan yang telah dilakukan, tabel *model summary* menunjukkan nilai *R square* ($R^2$) atau koefisien determinasi adalah 0,640 atau sebesar 64% dan berdasarkan uji hipotesis dengan hasil tabel menunjukkan nilai Sig (0.000) < dari α (0.05) dimana besarnya pengaruh variabel Sistem Informasi Akuntansi kausal sebesar 0,559. Dapat Disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial pada Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

**4.1.4.2 Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil dari uji asumsi kolerasi diperoleh hasil bahwa nilai Sig.(*2-tailed*) semuanya memiliki nilai yang lebih kecil dari ketentuan nilai α (0,05), berdasarkan uji koefisien determinasi diperoreleh hasil penghitungan yang telah dilakukan, tabel *model summary* menunjukkan nilai *R square* ($R^2$) atau koefisien determinasi adalah 0,640 atau sebesar 64% dan berdasarkan uji hipotesis dengan hasil tabel menunjukkan nilai Sig (0.000) < dari α (0.05) dimana besarnya pengaruh variabel Sistem Informasi Akuntansi kausal sebesar 0,407. Dapat Disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial pada Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

**4.2 Pembahasan**

**4.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasrkan hasil uji hipotesis sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana dari hasil uji hipotesis yaitu sebesar 0.559 karena nilai kolom Sig. lebih kecil dari α (0.05). Nilai informasi pelaporan keuangan yang masih lemah dikarenakan masih kurangnya pemahaman terhadap prosedur Sistem Informasi Akuntansi yang berlaku dan tidak selalu mengikuti prosedur Sistem Informasi Akuntansi yang berlaku. Maka dapat disimpulkan jika pemahaman yang kurang serta tidak selalu mengikuti sistem informasi akuntansi yang berlaku akan berpengaruh pada nilai informasi keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida, Nyoman dan Ni Kadek (2014) dengan hasil penelitian di ketahui pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhdap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah akan meningkat. Purwaniati dan Imam, (2008). Penerapan sistem akuntansi ini berfungsi sebagai mekanisme, prosedur kerja dan alat kontrol dalam pengelolaan keuangan. Agar semua pelaksana keuangan daerah mempu mengelola keuangan mengenai sistem akuntansi, oleh sebab itu pemahaman pengelolaan keuangan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini akan menunjang daerah dalam menyajikan laporan keuangan. Dalam penelitian Wiwik (2010) menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan meningkatkan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian Safrida et al (2010) pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### 4.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana dari hasil uji hipotesis yaitu sebesar 0.407 karena nilai kolom Sig. lebih kecil dari α (0.05). Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah yang kurang baik kareana masih lemahnya sitem pengendalian intern dimana belum optimalnya kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan. Maka dapat disimpulkan Sistem pengendalian intern yang lemah akan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Komang, Wayan dan I Wayan (2014) dengan hasil sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan. daerah menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. bahwa ada pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengawasan keuangan daerah secara positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 70,70% nilai informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah, sedangkan pengaruh dari variabel lain diluar variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah sebesar 29,30%. Celviana dan Rahmawati (2010) berdasarkan hasil penelitiannya menerangkan variable sistem penegendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan. Dita dan Warsito (2010) hasil pengujian hipotesis H5 menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 2,520 > t tabel 1,984.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah . Pengaruhnya cukup besar dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi pelaksanaan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Sistem Pengendalian Intern memiliki hubungan positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya semakin besar Sistem Pengendalian Intern maka Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin besar pula. Namun Sistem pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum optimal, terlihat dari masih terdapat beberapa program kerja yang tidak terlaksana.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain:

1. Diharapkan para pegawai Subbagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat lebih mengasah pengalaman, dan mengikuti berbagai pelatihan mengenai Sistem Informasi Akuntasi juga Standar Akuntansi Pemerintahan agar dapat meningkatkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga memperoleh kualitas keuangan yang baik.
2. Diharapkan pemerintah daerah dapat memperbaiki Sitem Pengendalian Intern pada Subbagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk lebih disiplin dalam meningkatkan kinerja pegawai sehingga semua program kerja akan terlaksanakan dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA


Aa Umbara Sutisna. (2015). *DPRD Kabupaten Bandung Barat Ragukan Pemkab Raih WTP*. Diakses pada 2 Mei, 2015 dari *World Wide Web*: http://inilahkoran.com.

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.

Agustinus Mujilan. (2012). *Sistem Informasi Akuntansi:Teori dan Wawasan di Dunia Elektrinis.* Edisi Pertama. Madiun:WIMA Pers.

Andi, S. (2007). *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Azhar, La Midjan dan Susanto. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi I dan II.,* Edisi Ke Sebelas, Lembaga Informatika, Bandung.

Arens, Alvin A, Randal J Elder & Mark S Beasley. (2003). *Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu.* Jakarta: Erlangga.

Bodnar, George H. dan William S. Hopwood. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*: *Buku 1*.. Salemba Empat. Jakarta.

Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.(2014).*Gambaran Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerha Berbasis Akrual Sesuai PP NO.71 Tahun 2010*.Buku 1. Jakarta.

Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). *Simposiun Nasional Akuntansi XIII*. Universitas Jenderal Sudirman.Purwoketo.

Cornell S. Prawiradiningrat. (2015). *Penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2013*. Diakses pada 31 May, 2015 dari *World Wide Web*: http://bandung.bpk.go.id/?p=6600.

Di Asih I Maruddani. (2014). *Modul Praktikum Ekonometrika*. Semarang. Universitas Dipenogoro.

Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.

I Made Wirartha. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis.* Yogyakarta : Andi.

Ida Bagus Pujiswara, Nyoman Trisna Herawati & Ni Kadek Sinarwati. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). *E-Journal SI Ak Vol 2 No 1*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan. (2012). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuagan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trinomika Vol 11 No 1 hlm 29-39.ISSN 1411-514X*. Universitas Pasundan Bandung.

James A. Hall. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*.Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Juliansyah Noor. (2012). *Metodologi Penelitian : Skripsi, thesis, disertasi & karya ilmiah* .Edisi Pertama Cetakan Kedua.Jakarta:Prenada media group.

Komang, Wayan & I Wayan. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Derah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPS) . *E-Jurnal Bisma Vol 2*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta:UPP-STIM YKPN.

Lyna Latifah dan Arifin Sabeni. (2007). Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengan dan Daerah Istimewah Yogyakarta). *Simposium Nasional X*. Universitas Diponogoro.

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:UPP-STIM YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan ke-4. Yogyakarta:Andi.

Mei Ajarwati. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Tehadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765. Universitas Negeri Semarang.

Moh. Nazir. (2005).*Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Moeller, Robert. (2009). *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body Of Knowledge*. Seventh Edition. England: John Wiley & Sons.

Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem pengendalian Intern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Purwaniati dan Imam. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi PemerintahanTerhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol 13 No 1.Universitas Gunadarma.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Safrida Yuliani,Nadirsyah & Usman Bakar. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi,Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal telaah & Riset Akuntansi Vol 3 No 2 hlm 206-220*.ISSN 1693-3397.Universitas Syiah Kuala.

Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV. Bandung.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung:Alfabeta.

Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

Umi Narimawati. (2007). *Riset Manajemen Sumber daya Manusia.* Jakarta:Restu Agung.

Umi Narimawati. (2010). *Penulisan Karya Ilmiah.* Bekasi: Genesis.

Umi Narimawati. (2010). *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi.* Jakarta:Genesis.

Wing Wahyu Winarno. (2006). *Sistem informasi akuntansi*. Edisi 2, penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Yunus Indra Purnama. (2010). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah. *Jurnal Solusi* Vol 5 Nomor 2. Universitas Teknologi Yogyakarta.